

# CERTIFICATE

*is awarded to*

*for participating at the  
International Seminar*

*“Integration of Knowledge: Between Ideal and Reality”*

*conducted with the cooperation of*

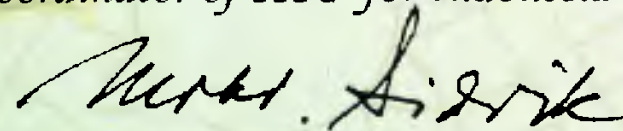
*The State Islamic University of North Sumatra  
and The International Institute of Islamic Thought  
at Madani Hotel Medan on December 7, 2015.*

*Rector of UINSU*



*Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA*

*Coordinator of IIIT for Indonesia*



*Drs. H. Muhammad Siddik, MA*

# **The Concept of Legal Integration: Islamic and Western Laws in The Field of Economic Law**

**Mustapa Khamal Rokan**  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara)

---

## **Abstract**

The discourse of trichotomy between Islamic, Western, and customary laws has continued to be a point of discussion in Indonesian academia. If in colonial and early independence times, there was a dichotomy (by intent of all parties involved) between Islamic and customary law, now there is a dichotomy between Islamic and Western (or conventional) laws, especially related to economic laws. The process of Islamic legal integration emphasizes *maslahah* (benefit) by accepting traditional legal knowledge critically and producing new rulings when necessary to fulfill Islamic legal purpose (*maqasid al-sharia*). The result of this research showed that economic laws in Indonesia originates from the West but has its source in Islamic law (legal history study). It was found that some parts of Western law are compatible with Islamic law. As such, an integrated legal system is needed, one that is compatible with the economic laws set in the Indonesian constitution, especially Article 33 of the Indonesian Foundational Law of 1945 (*Undang-undang Dasar 1945* - UUD45).

Keywords: Legal Integration, Western Law, Islamic Law and Economic Law

---

## **ABSTRAK**

Diskursus trikotomi hukum Islam, hukum barat dan hukum adat terus berdinamika. Jika di era penjajahan dan awal kemerdekaan terdapat pertentangan (baca: dipertentangkan) hukum Islam dan hukum adat, saat ini terjadi dikotomi hukum Islam dan hukum yang berasal dari barat (konvensional) terutama yang terkait dengan hukum ekonomi. Proses integrasi hukum ekonomi Islam sebagaimana konsep hukum Islam itu sendiri adalah mengedepankan konsep mashlahat (kebaikan) dengan cara menerima hukum yang sebelumnya, mengkritik dan mengkolaborasi hukum serta membuat hukum baru sesuai dengan cara kerja dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi di Indonesia berasal dari barat namun bersumber dari hukum Islam (kajian sejarah hukum), hukum barat yang secara teknis sesuai dengan hukum Islam dan hukum barat yang tidak sesuai dengan hukum Islam baik dalam tataran filosofi maupun aturan. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum (hukum ekonomi) yang berparadigma integratif yang sesuai dengan paradigma hukum ekonomi konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

**Kata Kunci: Integrasi hukum, Hukum Ekonomi, Hukum Islam**

---

## **A. PENDAHULUAN**

Apa yang difikirkan oleh para ahli hukum saat melihat persoalan hukum di Indonesia?. Berbagai persoalan hukum muncul, datang silih sekaligus riuh-rendah seakan tidak akan berakhir dan semakin ramai saja. Korupsi adalah persoalan hukum yang paling banyak mengemuka disamping tindak kriminal lainnya. Demikian juga dalam bidang hukum administrasi, perdata dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum ekonomi terdapat beberapa

isu yang muncul beberapa tahun belakangan. Seperti persoalan hukum pertambangan emas yang saat ini masih dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Persoalan yang muncul adalah persoalan perpanjangan kontrak atau tidak setelah masa kontrak yang akan berakhir pada tahun 2021. Persoalan yang muncul adalah terkait dengan pertentangan antara kedaulatan (*sovereignty*) dan kepentingan investasi. Kedaulatan rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi telah termaktub pada Pasal 33 UUD 1945, "Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>1</sup> Sedangkan di sisi lain perpanjangan kontrak penambangan emas Freeport adalah kepentingan investasi (*economic interest*) dimana selain juga merupakan kepentingan ekonomi nasional, namun terdapat kepentingan asing di dalamnya. Akhirnya, terjadi perbenturan antara kepentingan-kepentingan ekonomi termasuk asing di dalamnya dengan kepentingan rakyat khususnya hak-hak rakyat papua (*people right*) sebagai *locus* keberadaan PT. Freeport.

Sebelumnya, masalah pertambangan juga muncul dalam sengketa pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Dalam hal pembelian saham Nowmont, Menteri Keuangan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dengan DPR dan BPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>2</sup> Persoalan hukum yang mengemuka adalah pembelian itu dapat dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara sudah tepat secara hukum? Jika pembelian saham NNT itu merupakan penyertaan modal pemerintah (PMP), bukankah harus melalui persetujuan DPR lebih dahulu?

Demikian juga deregulasi kebijakan ekonomi yang ditandai dengan reformasi ekonomi yang berjilid-jilid. Dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia, kebijakan deregulasi ekonomi berakibat terjadinya gelombang PHK yang besar di banyak perusahaan. Lebih jauh dari itu, kedaulatan negara menjadi dipertanyakan akibat dari dikeluarkannya paket-paket kebijakan ekonomi dengan mempermudah pemberian perizinan kepada pelaku usaha asing. Dalam hal pasar ritel misalnya, kelonggaran yang diberikan kepada pelaku usaha termasuk pengusaha asing untuk melakukan investasi di bidang usaha ritel dapat berakibat keterpinggiran pelaku usaha kecil seperti pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil. Pelaku usaha kecil di pasar tradisional dan warung-warung misalnya adalah salah satu entitas bisnis yang penting diperhatikan dalam kaitan dengan kebijakan

---

<sup>1</sup> Pasal (2) dan (3) UUD 1945

<sup>2</sup> Harian Republika 16 Maret 2013

deregulasi ini, dimana pelaku usaha besar atau asing dapat mendominasi dan meminggirkan pelaku usaha kecil.

Persoalan hukum yang semakin *complicated* seperti sedikit gambaran yang disebutkan di atas tidak lagi bisa dituntaskan dengan mengedepankan satu cara pandang yang selama ini mendominasi langit hukum Indonesia yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) semata. Dalam berbagai tulisan dan dialog pendekatan undang-undangan dengan mengedepankan pasal-pasal mendominasi upaya penyelesaian persoalan. Keakutan dan keragaman persoalan hukum yang terjadi dewasa ini menuntut dan membutuhkan cara pandang (*worldview*) yang bersifat *integrated* semua bidang keilmuan sehingga persoalan-persoalan hukum yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain persoalan-persoalan hukum semakin menuntut ilmu-ilmu lainnya untuk ikut berpartisipasi (*take a part*) untuk menyelesaikannya.

Indonesia, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum, yang menghendaki hukum menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Persoalan-persoalan yang muncul menuntut hukum untuk tidak bekerja secara sendirian, tetapi dibutuhkan ilmu-ilmu lain untuk bekerja secara *integrated*. Selain unsur-unsur hukum dan penegakannya (*law enforcement*), tampaknya pendekatan dan cara pandang terhadap ilmu hukum menjadi hal yang urgen dalam melihat persoalan hukum dewasa ini. Dan tulisan ini mencoba mendekati persoalan hukum melalui perspektif integrasi-transdisiplin.

## **B. Integrasi Sistem Hukum atau Transdisiplin Hukum?**

Memahami integrasi keilmuan (*integration of knowledge*) maka kita akan menemukan beberapa istilah seperti integrasi-interdisipliner (*interdisciplinary*), integrasi-multidisipliner (*multidisciplinary*), interkoneksi ilmu pengetahuan, lintas disiplin (*cross disciplinary*) dan sejumlah istilah integrasi lainnya.<sup>3</sup> Berbagai istilah di atas memiliki kekhasan dan penekanan masing-masing sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan dan tentu mempunyai banyak kesamaan.

---

<sup>3</sup> Istilah *cross-disciplinary* terdapat di perguruan tinggi University of Melbourne, Australia. Di perguruan tinggi ini ditawarkan sejumlah mata kuliah interdisipliner dengan gelar lintas disiplin (*cross-disciplinary degrees*). Alumninya diharapkan *knowledgeable across disciplines* (berpengetahuan lintas disiplin) dengan kemampuan untuk "examine critically, synthesize and evaluate knowledge across a broad range of disciplines. Lihat, Clinton Golding, *Integrating The Disciplines: Successful Interdisciplinary Subject*, dalam Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*, (Medan: iainpress, 2014), hlm. 49



Istilah teori dan kefilsafatan hukum di Indonesia juga muncul sejumlah istilah seperti teori hukum progresif yang dicetuskan Prof. Satjipto Rahardjo yang menghendaki hukum sebagai alat yang mengalami pertukaran dengan kekuatan yang diluar hukum sehingga hukum sebagai sarana perekayasa sosial. Romli Attasamita (2012) mencetuskan teori hukum integratif yang memahami hukum sebagai pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam dinamika kehidupan.<sup>4</sup> Belakangan muncul beberapa teori hukum lainnya seperti ilmu hukum non-sistemik (Anton F. Susanto, 2010),<sup>5</sup> teori hukum integratif (Khuzaiifah Dimiyati, 2014),<sup>6</sup> ilmu hukum profetik (M. Syamsuddin, 2013),<sup>7</sup> serta teori hukum konvergensi (Danrivanto, 2015).<sup>8</sup>

Bagaimana pendekatan dan perspektif sistem hukum di Indonesia. Secara umum, dalam sejarah hukum Indonesia bahwa terjadi kompetisi keberlakuan yang berporos pada tiga (3) sistem hukum yakni hukum Islam, hukum barat dan hukum adat.<sup>9</sup> Hukum Islam yang merupakan hukum yang berasal dari dari wahyu Allah Swt. dan hadis Nabi Muhammad serta pendapat para ulama dengan melakukan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat atau biasa disebut dengan hukum hidup yang hidup (*living law*) atau juga hukum kebiasaan (*customary law*). Hukum barat yang diawali oleh hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda serta hukum barat kontemporer saat ini.

Menariknya, keberlakuan sistem hukum dari sejak zaman penjajahan Belanda adalah melibatkan perseteruan antara hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Jika pada zaman Belanda hingga awal kemerdekaan sistem hukum yang “bertarung” adalah antara hukum Islam dengan hukum adat sehingga dikenal beberapa teori keberlakuan hukum Islam versus hukum adat.

Pertentangan hukum Islam dengan hukum adat ditandai dengan bermunculanya teor-teori keberlakuan hukum Islam seperti Teori *Receptio in complexu* yang menyatakan di

---

<sup>4</sup> Romli Attasamita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

<sup>5</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

<sup>7</sup> M. Syamsuddin Dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)

<sup>8</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

<sup>9</sup> Sebenarnya penyebutan istilah kompetisi tidak selamanya disepakati oleh para ahli hukum. Qadri Azizy lebih melihat ketiga sistem hukum (Islam, Barat dan Adat) dibenturkan baik secara ilmiah maupun praktisnya oleh penjajah. Lihat, Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: PT. Teraju, 2004), hlm. xi

Indonesia berlaku hukum Islam sebagaimana pendapat Solomon Keyzer (1823-1868).<sup>10</sup> Demikian juga dengan Teori *receptio* yang merupakan bantahan terhadap teori *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) yang saat itu menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dan bumi putra dengan teorinya yang disebut *receptio*.<sup>11</sup> Lalu muncul Teori *Receptio Exit* yang merupakan penentangan dikalangan para ahli hukum Islam terhadap teori *Receptio*.<sup>12</sup> Kemudian muncul Teori *Receptio a contrario* yang merupakan bantahan terhadap teori *Receptio*. Teori *Receptio a contrario* dicetuskan oleh Prof. Hazairin dimana hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, seperti di masyarakat Aceh yang menghendaki perkawinan dan kewarisan diatur dan disesuaikan dengan hukum Islam. Bila berlaku hukum adat dapat juga diterima apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Terakhir tersebut teori eksistensi. Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>13</sup>

Saat ini (walau tidak berarti pertarungan secara diametra) terjadi pegeseran pertarungan hukum Islam dengan hukum barat atau hukum yang berasal dari negara-negara

---

<sup>10</sup> Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan *receptio in complexu*. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998), hlm. 241.

<sup>11</sup> Teori *Reception* menurut Mohammad Daud Ali dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau keseluruhan aturan hukum tertentu diambilalih dari perangkat hukum yang lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya, dan hukum Romawi telah diresepsikan pula oleh hukum banyak negara di Eropa, ada yang banyak dan ada pula yang sedikit atau sebagian. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hl. 242, dalam foonote.

<sup>12</sup> Menurut Hazairin teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori Syetan). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Pada saat Indonesia merdeka, Hazairin mengatakan: Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3, (Jakarta : Tintamas, 1982), hal. 7-8.

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.

barat. Pertarungan eksistensi sistem hukum ini sangat terasa dalam membaca literatur-literatur hukum tentang satu subjek. Misalnya terdapat literatur hukum perjanjian dengan hukum perjanjian Islam, hukum pasar modal dengan pasar modal syariah dan seterusnya. Dikotomi hukum Islam dan barat juga sangat terasa dalam pengajaran hukum di fakultas hukum khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum seperti di Universitas Islam Negeri (UIN). Misalnya saja, pertarungan antara hukum perdata yang berasal dari hukum Belanda yang terdapat di KUHPerdata atau KUHDagang dan hukum-hukum yang berasal dari doktrin-doktrin hukum barat semisalnya *Bussiness Law*, *Consumer Protection Law*, *Antitrust Law*, *Property Right Law* dengan Fikih Muamalah yang terdapat di fikih-fikih klasik maupun kontemporer (*Muamalah al-Mu'ashirah*).

Ketika mahasiswa mempelajari hukum perusahaan misalnya, maka akan muncul pertanyaan bagaimana hukum perusahaan konvensional dan bagaimana pula menurut Islam. Lalu kemudian, apakah bisa disamakan Perseroan Terbatas dengan Mudharabah?, atau samakah CV dengan mudharabah? Demikian juga perdebatan antara badan hukum perusahaan dalam konsep barat dan hukum Islam yang banyak diketengahkan oleh Imam Abu Hanifah dan seterusnya.

Dikotomi tersebut sesungguhnya sangatlah wajar sebab kedua sumber hukum (Islam dan Barat) adalah berbeda sehingga para penggiat hukum seperti mahasiswa ingin mengetahui sistem hukum yang mana yang lebih dianggap baik, cocok dan sebagainya. Namun demikian, kesan dikotomi tersebut sangat dipertentangkan secara terus menerus sehingga terjadi cara pandangan yang sempit pada satu sistem keilmuan dan memandang superior pada satu sistem keilmuan. Dengan kata lain, masing-masing perspektif atau cara pandangan hukum seakan tidak berkorelasi atau terinterrelasi sehingga keilmuan hukum menjadi wilayah yang sempit sekaligus membosankan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan cara pandang yang berbeda dalam upaya melakukan pengembangan ilmu dengan apa yang disebut dengan integrasi-transdisiplinary.

### **C. Integrasi-Transdisipliner Ilmu Hukum**

Menarik untuk mengkaji sikap atau respon hukum Islam terhadap hukum lainnya. Pertanyaannya adalah apakah hukum Islam bersifat eksklusif dalam arti mempunyai hukum materiil tersendiri sehingga harus berbeda dan berjarak dengan hukum yang lain?. Bagaimana posisi sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah dan ijtihad para ulama dalam melihat realitas persoalan hukum?

Sungguh karakter hukum Islam adalah terbuka bagi hukum yang mewujudkan tujuan hukum (*maqashid al-syariah*). Sebagaimana diketahui bahwa sifat hukum Islam pada saat Nabi Muhammad Saw. adalah bersifat adaptif terhadap hukum yang ada sebelumnya, yakni ada hukum lama yang ditolak atau diganti, terdapat hukum lama yang dimodifikasi dan terdapat hukum yang benar-benar baru.

Lalu bagaimana kedudukan sumber-sumber hukum Islam dalam melihat realitas hukum? Untuk menjawab hal ini maka paradigma hukum Islam tidak lagi hanya dianggap sebagai *ulumuddin* tetapi telah juga sebagai *dirasah islamiyah*. *Ulu'uddiniyah* dapat diartikan sebagai ilmu yang muncul sebagai respon sumber hukum secara langsung. Misalnya, perintah, larangan dalam kaitan dengan shalat, puasa, zakat dan seterusnya terbentuklah fikih atau hukum ibadah. Dalam hal ini Al-Quran hadis dan pendapat ulama adalah subjek sekaligus objek kajian hukum.

Sedangkan *dirasah islamiyah* adalah pemahaman yang lebih luas terhadap sumber hukum yang dikaitkan dengan fenomena alam semesta terutama tingkah laku manusia itu sendiri. Maka terdapatlah istilah yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sebagai sosiologi hukum yakni hukum yang dilihat dalam ruang sosial yang terjadi dimasyarakat, antropologi hukum yakni hukum yang dilihat dalam ruang manusia, politik hukum yakni hukum yang dilihat dari kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam kehidupan manusia dan seterusnya. Pada posisi ini, sumber hukum Islam tidak lagi menjadi subjek yang dikaji tetapi berfungsi sebagai penilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalamnya. Sedangkan objek kajian adalah fenomena alam terutama tingkah manusia yang untuk selanjutnya dinilai oleh sumber hukum.

Yang penting digarisbawahi adalah ciri ilmu hukum sebagai *dirasah islamiyah* adalah pada aspek kepentingan aplikasi ilmu hukum itu sendiri yang tidak hanya untuk keilmuan semata dan bukan bertujuan jangka pendek semata (hanya untuk kehidupan dunia). Sebab dalam konsep keilmuan Islam (*dirasah Islamiyah*) ilmu hukum bukan hanya sekedar ilmu tetapi adalah sebagai media mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Keilmuan hukum bukan hanya terkait dengan persoalan kepentingan dunia tetapi juga adalah kepentingan akhirat. Sampai disini, bahwa tidak terdapat dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat, atau dikotomi ilmu dan amal atau biasa disebut dengan aspek aksiologi.

Oleh karena itu integrasi ilmu hukum berarti kesatuan antara hukum yang dikaji dari keilmuan Islam (sumber hukum Islam) dan hukum yang dikaji berdasarkan fenomena alam terutama tingkah laku manusia dalam berbagai lapangan yang luas. Sehingga hukum dapat dilihat langsung dari perspektif agama (*ulumuddiniyah*) dan hukum yang dilihat dari



fenomena alam (dirasah Islamiyah) yang kesemua merujuk kepada tujuan hukum (*maqashid al-syariah*). Sebagai contoh, Dalam melihat hukum perusahaan, maka seorang ahli hukum dapat melihatnya dari prinsip (asas) atau penjelasan dari kitab suci (Al-Quran dan Hadis) terkait dengan organisasi bisnis seperti perusahaan. Secara bersamaan hukum perusahaan bisa dilihat dari fenomena hukum perusahaan yang terdapat dalam berbagai dimensi dan persoalan yang dinilai oleh sumber hukum Islam. Kedua cara pandang tersebut adalah satu kesatuan yang saling mengisi dan berkaitan.

Namun demikian, memang terdapat norma-norma hukum yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam terutama terkait dengan filosofi hukum atau hikmah hukum itu sendiri. Dalam konteks negara hukum maka terdapat tingkatan-tingkatan norma yang perlu disesuaikan dengan filosofi hukum Islam seperti pada tingkatan *Staat Fundamental Norm*, *Staatgerundgezet*, *Formelegezet*, *Ordnung* and *Autonomesatzung* sebagaimana yang dibagi oleh Hans Nawiasky.

Misalnya, dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CRS), badan hukum (*recht persoon*) yang secara umum tidak ada yang salah dengan konsep hukum Islam, namun dari segi filosofi terdapat problem yang tidak sederhana. GCG dalam hukum materilnya adalah konsep yang menghendaki pengelolaan secara baik dan sehat, GCG tetap berfilosofi untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam perusahaan. Berbeda dengan hikmah dalam hukum perusahaan dalam Islam adalah menciptakan kebaikan untuk semua. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum Islam secara khusus misalnya, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang telah menganut *dual asurance system* yakni hukum asuransi konvensional dan hukum asuransi syariah.

Namun, dalam melihat persoalan hukum tidak lagi hanya harus bersifat lintas batas sistem hukum namun seyogyanya melintasi tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh (holistik). Inilah yang disebut dengan transdisipliner. Prof. Nur. A. Fadhil Lubis memandang bahwa transdisiplin lebih ditekankan pada perspektif daripada pendekatan (*approach*). Transdisiplinaritas biasa dipahami sebagai suatu strategi penelitian yang melihat banyak tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang holistik (Lubis, 2014). Secara lengkap Gavan McDonel mengatakan *transdisciplinarity is integrating and transforming fields of knowledge from multiple perspectives to enhance understanding of problems to be addressed, in order to improve future choices*.

Dengan demikian, dengan perspektif transdisipliner diharapkan kasus-kasus hukum yang kompleks dan beragam dapat tertangani dengan tepat dengan cara tidak hanya meminjam disiplin keilmuan yang ada tetapi juga melampau (trans) keilmuan itu sendiri sehingga terjadi persinggungan diantaranya dan melahirkan sesuatu yang diharapkan menjadi solusi. Dalam hal korupsi misalnya, watak mencuri oleh para koruptor tidak hanya dapat dilihat dari hukum positif seperti efek jera (*deterent effect*) yang selama ini dilakukan seperti dengan hukuman yang maksimal, memakai baju rompi KPK dan seterusnya.

Namun ilmu antropologi yang membahas tentang dimensi kemanusiaan, sosiologi yang membahas tentang sosial masyarakat, spritualitas atau psikologi dan disiplin lainnya menjadi disiplin ilmu yang harus membantu penyakit kronis bangsa ini. Sebab perilaku korupsi yang terjadi, sungguh melibatkan faset-faset disiplin lain misalnya sifat mental masyarakat yang tak enak jika tak memberi, kondisi sosial masyarakat yang memaksa, mentalitas kemanusiaan yang sudah rapuh dan seterusnya. Ingat bahwa, transdisipliner tidak hanya sampai disitu, pandangan-pandangan berbagai jenis keilmuan tersebut dicari titik singgungnya untuk selanjutnya diformulasikan untuk menghasilkan cara penanganan korupsi yang efektif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Clinton Golding, *Integrating The Disciplines: Successful Interdisciplinary Subject*, dalam Nur A. Fadhil Lubis, *Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam: Memberi Makna Kelahiran UINSU*, (Medan: iainpress, 2014)
2. Romli Attasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
3. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistemik: Fondasai Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
4. Khudzaifah Dimyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistimologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
5. M. Syamsuddin Dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmoderen*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
6. Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
7. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: PT. Teraju, 2004)
8. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998)
9. Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Cet.3,(Jakarta : Tintamas, 1982)
10. Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 118.